

ANALISIS KRITIS TERHADAP WACANA JARINGAN ISLAM LIBERAL (PENDEKATAN CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS)

Januri¹

Abstrak

Tidak ada wacana atau gagasan hadir begitu saja tanpa sebab dan lahir di ruangan yang hampa. Teks (wacana) hadir mustahil tanpa kepentingan dan tujuan. Semua ada sebab akibat. Sampai al-Qur'an pun ada sebabnya (asbab al-nuzul). Hadits demikian juga, ada asbab al-wurudnya. Seseorang pun jika berkata pasti ada latar belakang dan tujuannya (kepentingannya). Demikian juga gagasan-gagasan Jaringan Islam Liberal (JIL). Gagasan-gagasan JIL tidak bebas nilai (ideologi) dan kepentingan. Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan normatif (dalil-dalil agama), akan tetapi menggunakan pendekatan analisis wacana kritis, arkeologi dan geneologi. Jika menggunakan pendekatan normatif maka penelitian ini tidak ada bedanya dengan *bahtsul masail* NU, MUI dan FUII, yang menfatwakan JIL sesat-menyesatkan. Penelitian dengan pendekatan ilmu sosial (analisis wacana, arkeologi, dan geneologi) bisa menganalisis suatu ideologi, kepentingan, relasi kuasa dan hegemoni gagasan-gagasan JIL. Dari penelitian ini, ditemukan kesimpulan *pertama*, pada gagasan-gagasan JIL terdapat ideologi yang tak tersurat, tak terbaca, yaitu ideologi liberalisme-kapitalisme, yang bersifat liberal (kebebasan), kanan, dan borjuis. *Kedua*, pada gagasan-gagasan JIL terdapat kepentingan ideologi liberalisme-kapitalisme. Sedangkan kepentingan ideologi liberalisme-kapitalisme adalah terwujudnya masyarakat yang maju, modern, liberal, bebas berpendapat, beragama, berpolitik, toleran, terbuka, terciptanya tatanan politik yang demokratis, tidak adanya fanatisme terhadap agama dan aliran, bisa menerima pihak lain, terpisahnya agama dari kehidupan politik, mengikuti gaya hidup modern (materialis-hedonis-pragmatis) dengan membongkar bias-bias gender (wanita boleh berkarir, wanita boleh jadi presiden, wanita boleh jadi imam sholat bagi laki-laki, wanita boleh tampil di publik, jilbab tidak wajib karena dianggap tradisi arab, lokalisasi/regulasi judi, miras, dan prostitusi), dan menerima konsekuensi dari persaingan pasar bebas, serta ekonomi berkembang dengan pesat. *Ketiga*, relasi kuasa gagasan JIL ada kaitannya dengan ideologi kapitalisme

1 Penulis Adalah Dosen Tetap STAI YASNI Muara Bungo.

global. Ada kesamaan gagasan JIL dan kapitalisme global. Seperti gagasan demokrasi, sekularisme, liberalisme agama (pluralisme, inklusivisme, dialog agama, modernisasi/ijtihad), pasar bebas dan liberalisme budaya (feminisme, gender, dehisibisasi, regulasi maksiat). Gagasan-gagasan JIL menjadi alat hegemoni dan manipulasi wacana sehingga konsep-konsep demokrasi liberal, sekularisme, pembangunanisme, pasar bebas dan non-intervensionisme bisa diterima dan bisa dilaksanakan di bumi pertiwi.

Kata Kunci : Islam liberal, wacana, ideologi, kepentingan, relasi kuasa dan hegemoni.

PENDAHULAN

1. Latar Belakang Masalah

Fenomena Islam Liberal selalu hadir, datang silih berganti dan selalu mendapatkan tanggapan negatif oleh sebagian kelompok. Hal ini terjadi sejak tahun 1960-an, gagasan Islam Liberal diusung oleh Harun Nasution, dalam bentuk Islam Rasional. Kemudian pada tahun 1970-an Nurcholish Madjid mengkampanyekan gagasan-gagasan Islam Liberal dalam bentuk Neo-Modernisme Islam.²

Setelah Cak Nur redup, kemudian muncul kembali nama yang berbeda, namun esensinya sama, yakni Ulil Abshor Abdalla, dkk. dengan Jaringan Islam liberal (JIL).³

Sejak berdiri 2001, JIL menjadi fenomenal. Ulil sebagai koordinator mendapat perhatian besar dari berbagai kalangan, baik yang pro maupun kontra. Hal itu bisa dilihat ketika ia menulis artikel di *Kompas*, 18 November 2002, dengan tema “Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam”, yang sempat menggegerkan umat Islam.⁴

Kampanye Islam Liberal kali ini lebih gencar sosialisasi, dibandingkan di era Neo-Modernisme Cak Nur dan Islam Rasional Harun Nasution. Media massa, baik elektronik (internet, TV, radio)

2 Greg Berton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia, Pemikiran Neomodernisme Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Paramadina-IKAPI-The Ford Fondation, 1999), hal. 1-10. Lihat www.islamlib.com/profil

3 Lihat www.islamlib.com/profil

4 Ulil Abshor Abdalla, “Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam”, *Kompas*/18/11/2002.

maupun cetak (koran, jurnal, buku dan buletin) menjadi media kampanye gagasan-gagasan Islam Liberal.⁵

Kompas, *Tempo*, dan *Jawa Pos* menjadi media JIL untuk mensosialisasikan gagasan-gagasannya, karena media-media itu merupakan media berskala nasional dan memiliki suplemen khusus untuk berbagai daerah.

Karena menggunakan media massa, JIL cepat mendapat reaksi dari masyarakat dan hal tersebut menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan prasangka-prasangka miring terhadap JIL. Mulai dari anggapan JIL didanai oleh Negara Barat untuk menghancurkan Islam dari dalam, JIL tidak punya metode tafsir yang jelas, sampai tuduhan JIL sebagai antek Zionisme Israel dan Neo-Imperialisme Barat.⁶

Ghozwu al-fikr (perang pemikiran) antara pihak pro dan kontra menghiasi halaman media massa, saling menghujat, pen-*takfiran* dan bahkan dikeluarkannya “fatwa mati” dan “penghalalan” darah. Fatwa itu dikeluarkan oleh Forum Ulama Islam Indonesia (FUII) yang dikoordinatori oleh KH Athian Ali, atas dasar Ulil dianggap telah menghina Islam, Allah swt. dan nabi Muhammad saw.⁷ Kemudian menyusul fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang ajaran sesat dan keharaman mengikuti paham pluralisme, liberalisme dan sekularisme yang dikampanyekan oleh JIL. Demikian juga dengan NU yang mengeluarkan fatwa yang sama.⁸

Hal itu bukan yang pertama bagi JIL, sebelumnya pada 04 Agustus 2002, iklan *Islam Warna Warni* di SCTV dan RCTI disomasi oleh Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), karena dianggap memanipulasi Islam. Sebelumnya Sukidi, salah satu kontributor JIL, diadakan ke polisi oleh MMI dengan alasan yang sama.⁹

Pada awalnya, cita-cita JIL itu mulia. JIL mempunyai visi-misi

5 Lihat www.islamlib.com/profil

6 Adian Husaini, *Islam Liberal*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 169-201.

7 Ulil Abshor Abdalla, *Pertarungan Wacana Islam Liberal*, (Yogyakarta: Elsaq, 2003), hal. xi-xii.

8 Rekomendasi MUKTAMAR NU XXXI di Asrama Haji Donohudan Solo Desember 2004. Lihat buku ASWAJA, Muhib Aman Ali, PP Besuk Kejayan Pasuruan, 2006. hal. 60.

9 Ulil Abshor Abdalla, *Pertarungan Wacana*., hal. 36.

terciptanya masyarakat muslim yang modern (maju), toleran, dialogis, dinamis, terbuka dan damai. Hanya saja gagasan yang JIL tawarkan adalah produk-produk liberal tentang pemahaman keislaman, sehingga menjadi polemik di tengah masyarakat.¹⁰

Hal itu terjadi karena dalam teori komunikasi kontemporer dan ilmu sosial kritis, media massa dan teks komunikasi itu tidak bebas nilai dan kepentingan.¹¹ Pers dan teks wacana (gagasan) apa pun tidak bisa lepas dari kepentingan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama. Tidak ada satu pun media dan wacana (gagasan) yang mempunyai independensi dan objektivitas absolut.¹²

Oleh karena itu peneliti akan meneliti gagasan-gagasan JIL dengan pendekatan ilmu sosial kritis, yaitu Analisis Wacana Kritis, bukan pendekatan normatif. Jika peneliti menggunakan pendekatan normatif maka tidak ada bedanya dengan *Bahtsul Masail* MUI, NU dan FUII, yang menfatwakan JIL Sesat-Menyesatkan.

Menurut Ali Harb,¹³ suatu penelitian terhadap teks layak diteliti, apabila teks tersebut menjadi perdebatan publik, menjadi referensi banyak orang dan kebenaran tunggal (*dogmatisme*), bahkan menjadi pusat kebenaran (*logosentrisme*).¹⁴

Dalam konteks pemikiran Ali Harb itu, Ulil sebagai representasi JIL telah menjadi tokoh publik yang diperdebatkan banyak orang, pendapatnya dikutip di sana-sini, dipuji dan dibela banyak intelektual, rohaniawan dan yang berkepentingan dengannya. Di sisi lain, ia dikritik, dihujat, dan dihalalkan darahnya. Di sinilah penelitian terhadap wacana JIL menjadi penting. Atas dasar itu, penelitian ini peneliti beri judul “Analisis Kritis terhadap Wacana Jaringan Islam Liberal (Pendekatan *Critical Discourse Analysis*)”.

10 Zuly Qodir, *Islam Liberal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 139.

11 Agus Sudibyo, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hal. 299-301; dan Alex Sobur, *Analisis Teks Media*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), hal 2-3.

12 Eriyanto, *Analisis Framing:Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, (Yogyakarta:LKIS, 2004), hal. V.

13 Nur Kholik Ridwan, *Pluralisme Borjuis*, (Yogyakarta: Gerigi Pustaka, 2002), hal. Xii.

14 Ilyas Supena dan Ahmad Fauzi, *Dekonstruksi Dan Rekonstruksi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Gama Media dan Walisongo Press, 2003), hal. 30-34.

2. Rumusan Masalah

Pertama, apa saja gagasan/wacana JIL? *Kedua*, apa kepentingan yang terdapat pada gagasan-gagasan JIL? *Ketiga*, Apa ideologi gagasan JIL? *Keempat*, bagaimana relasi kuasa dan hegemoni gagasan-gagasan JIL?

3. Tujuan Penelitian

Pertama, untuk mengetahui gagasan JIL? *Kedua*, untuk mengetahui kepentingan yang terdapat pada gagasan-gagasan JIL? *Ketiga*, untuk mengetahui ideologi gagasan JIL? *Keempat*, untuk mengetahui relasi kuasa dan hegemoni gagasan-gagasan JIL?

4. Metode dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Kualitatif. Secara umum penelitian kualitatif digunakan untuk memahami makna realitas atau fakta dengan cara non-statistik, yang bersifat deskriptif, interpretatif, induktif, analitis dan pengembangan teori.¹⁵

Pendekatan yang digunakan *Analisis Wacana Kritis*. Analisis ini membahas bahasa (teks dalam unit terkecilnya) dalam rangkaian kesatuan situasi penggunaan yang utuh, dimana wacana itu berada pada rangkaian konteks. Pendekatan ini melihat teks hadir tidak di dalam ruang sosial yang hampa, tetapi ada kekuatan besar (modal, kuasa, ideologi, hegemoni) diluar teks yang melingkupi kehadiran teks.¹⁶

Data primer adalah data-data berasal dari buku-buku yang pernah diterbitkan oleh JIL, atau tulisan-tulisan yang masih berserakan di internet, dan media massa lainnya. Sedangkan data sekunder adalah data-data pendukung lainnya, misalnya buku, jurnal, dan surat kabar yang ada kaitannya dengan data primer.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.¹⁷ Metode dokumentasi ini peneliti

15 Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), hal. 123-125.

16 Eriyanto, *Analisis Wacana*, (Yogyakarta : LKIS, 2003), hal. 1-10.

17 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hal. 260.

gunakan untuk mencari data tentang teks-teks JIL, yang merupakan data primer dan buku-buku atau referensi-referensi lain yang ada kaitannya dengan penelitian.

Dalam penelitian ini, untuk meneliti isi teks-teks JIL itu tidak cukup hanya menggunakan pendekatan *Analisis Wacana Kritis*, namun diperlukan juga kerangka operasional yang lebih praksis, yaitu tehnik analisis arkeologi dan genealogi.¹⁸

Arkeologi merupakan metode pencarian makna dari suatu teks atau gagasan. Arkeologi digunakan untuk meneliti sejarah munculnya pernyataan, fundamen-fundamen pembentuknya, yang menjadi sebuah kebenaran dan ideologi. Tugas kedua, membaca teks yang tak terbaca pada teks, dan membongkar dokumen yang telah menyejarah dan disakralkan oleh rezim kekuasaan, pemodal, dan agama. Sedangkan genealogi berpusat pada bagaimana hubungan timbal balik antara kebenaran, wacana, dan sejarah, dengan mekanisme kuasa, rezim yang memproduksi dan menentukan suatu kebenaran wacana. Genealogi menganalisa awal mula wacana dan perkembangan wacana, serta menganalisis dominasi, hubungan kekuatan dan kekuasaan.¹⁹ Kedua metode inilah peneliti gunakan untuk mencari ideologi dan kepentingan di balik gagasan-gagasan JIL.

5. Kerangka Teori Penelitian

a. Paradigma Penelitian Teks

Dalam penelitian teks wacana, ada tiga mazhab penelitian. *Pertama*, mazhab *Positivisme*. Menurut pandangan ini kebenaran wacana teks diukur dari segi kebenaran tata bahasa, sintaksis dan semantiknya. *Kedua*, mazhab *Konstruktivisme*. Pandangan ini memahami bahasa teks sebagai

18 Metode ini pernah digunakan oleh Mohamed Arkoun, dalam kitabnya *Al-fikr al-Islam : Naqd Wa Ijtihad*, Lihat Luthfi Assyaukanie, "Islam dalam Konteks Pemikiran Pascamodernisme", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 01, Vol. V, (Jakarta: 1994), hal. 25. Metode ini juga pernah digunakan oleh Ahmad Baso dalam bukunya "*Civil Society Versus Masyarakat Madani : Arkeologi Pemikiran Civil Society dalam Islam Indonesia*", dan pernah juga digunakan oleh Nur Kholik Ridwan dalam bukunya "*Pluralisme Borjuis*".

19 Petrus Sunu Hardiyanta, *Michel Foucault dan Disiplin Tubuh*, (Yogyakarta: LKIS, 1997), hal. 10-13.

alat yang mempunyai tujuan, maksud dan makna tertentu dari seorang pembuat teks. *Ketiga*, mazhab *Kritisisme*. Pandangan ini merupakan koreksi terhadap positivisme dan konstruktivisme. Pandangan ini lebih dalam lagi sampai analisa faktor eksternal teks dan pembuat teks, yaitu kepentingan kekuasaan, modal dan ideologi yang berperan dalam memproduksi wacana.²⁰

Dari alasan di atas itulah, oleh Eriyanto, dan Dedy Nur Hidayat, istilah analisis wacana diartikan dengan Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*), karena analisis wacana yang digunakan adalah analisis wacana dalam perspektif kritis, bukan konstruktivisme atau positivisme.²¹ CDA bisa mengungkap wacana yang berkaitan dengan power dan ideologi, politik, dan bentuk-bentuk perubahan sosial.²²

b. Analisis Wacana Kritis Sebagai Pendekatan Penelitian Teks

Kajian teks komunikasi, baik itu al-Qur'an, al-Hadits, kitab fikih, tafsir, maupun teks komunikasi media massa secara umum, bisa menggunakan beberapa pendekatan. Banyak pendekatan yang bisa digunakan, misalnya pendekatan fisiologi, hermeneutika, semiotika, analisis wacana kritis, framing, pos-strukturalisme, dll.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan analisis wacana kritis. Analisis Wacana Kritis tidak hanya digunakan untuk menganalisis teks berita, akan tetapi semua teks komunikasi, misalnya tajuk rencana, editorial, artikel ilmiah, iklan, *lay out*, karikatur.²³ Atas dasar itu, maka peneliti akan mengkaji teks-teks JIL yang ada di koran, internet, dan buku dengan *Critical Discourse Analysis*.

Analisis Wacana Kritis dapat diartikan sebagai studi tentang struktur pesan dalam komunikasi. Analisis wacana lebih melihat pada "bagaimana" teks dibuat dan disampaikan, serta melihat makna yang tersembunyi dibalik teks.²⁴

20 Dedy N. Hidayat, *Paradigma Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Jurnal ISKI, 1999), hal. 33.

21 Eriyanto, *Analisis Wacana*, hal. 3-18.

22 Aminudin, *Analisis Wacana*, (Yogyakarta: Kanak, 2002), hal. 02-03.

23 John B Thompson, *Analisis Ideologi*, (Yogyakarta: Ircisod, 2003), hal. 22.

24 Alex Sobur, *Analisis Teks Media*, hal. 48, 68.

Analisis Wacana Kritis berpandangan bahwa teks wacana telah dipengaruhi oleh konstelasi kekuatan luar dalam proses produksi dan reproduksinya. Individu tidak netral, karena sangat berhubungan dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang ada dalam masyarakatnya. Bahasa juga tidak netral. Bahasa bisa membentuk subyek tertentu, wacana tertentu. Media tidak independen dari kepentingan, ideologi, penguasa dan pemodal. Melihat dari proses pemberitaan media yang demikian itu, sehingga teks yang sesungguhnya tereduksi, yang ada hanya teks yang telah termanipulasi. Oleh karena itu, untuk mencari teks yang sesungguhnya perlu analisis yang mengaitkan antara teks, konteks, historis, kekuasaan, modal dan ideologi.²⁵

Wacana yang dimaksud di sini juga sesuatu yang masuk ke wilayah Un spoken, sesuatu yang tak terbicarakan, yang tak terbaca, yang harus dibongkar dari teks. Dalam bahasa Arkoun, wacana merupakan sesuatu *Unthinkable* (sesuatu yang tak terpikirkan) di balik teks, atau *Al-Qira'ah Ma Lam Yuqra* dalam bahasa Ali Harb.²⁶

c. Wacana itu terdiri dari Makna, Ideologi, dan Kepentingan

Menurut Foucault, teks merupakan hasil produksi dan reproduksi sesuai dengan kepentingan dan nilai tertentu. Baginya, bahasa merupakan representasi makna, gagasan, pandangan hidup, ideologi, yang digunakan untuk mempengaruhi cara berpikir dan menjadi alat hegemoni dan dominasi atas kelompok.²⁷ Menurut Thompson, teks merupakan representasi kepentingan, ideologi dan kekuasaan.²⁸

Menurut Fowler, bahasa teks (wacana) merupakan ideologi itu sendiri. Artinya, jika meneliti teks maka sama dengan meneliti ideologi. Ideologi merupakan sistem nilai yang diterima oleh komunitas dan mampu menggerakkan seseorang ke dalam pola laku dan sistem tertentu. Ideologi yang dimaksud adalah ideologi yang bersifat *universal* dan *latent*, halus. Ia merupakan sistem nilai yang melekat dan tanpa sadar diterima sebagai kebenaran, seperti sosialisme, kapitalisme, komunisme, dll.²⁹

25 Eriyanto, *Analisis Wacana*, hal. 03-14.

26 Ilyas Supena dan Ahmad Fauzi, *Dekonstruksi*, hal. 86.

27 Eriyanto, *Analisis Wacana*, hal. 66.

28 John B. Thompson, *Op.cit.*, hal. 192, 205.

29 Eriyanto, *Analisis Wacana*, hal. 14.

Setiap ideologi mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. Ideologi Kapitalisme misalkan, mempunyai kepentingan masyarakat hidup liberal, dan bebas dari struktur-struktur agama dan negara, dan dikendalikan oleh mekanisme pasar. Ideologi kapitalisme melahirkan liberalisme ekonomi, politik, agama dan budaya. Ideologi ini yang ujung-ujungnya akan menguntungkan kelompok mapan dan kuat secara politik, ekonomi dan kelas-kelas sosial lainnya. Ia sangat “menindas” sekalipun atas nama “kalah” dalam persaingan global/pasar bebas.³⁰

d. Pertautan antara Teks, Pengetahuan, Kekuasaan dan Ideologi

Menurut Edward Said, di era pos-kolonialisme ini, terjadi perselingkuhan antara bahasa, kebenaran, pengetahuan, kekuasaan, dan politik. Kebenaran adalah apa yang dikatakan benar oleh struktur wacana melalui bahasa, yang dikuatkan oleh argumen ilmiah, sedangkan kekuasaan berposisi sebagai aturan yang menguasai, menentukan salah benar dan alat legitimasi sebuah kebenaran yang diwacanakan. Kebenaran tak pernah berada diluar kekuasaan, wacana dan pengetahuan.³¹

Menurut Althusser, wacana merupakan arena perjuangan dari berbagai ideologi dan kepentingan. Derrida mengatakan bahwa bahasa tidak pernah netral dan tidak pernah bersalah, tapi selalu berubah. Berubah sesuai dengan kepentingan dan ideologi tertentu. Walaupun ia hadir sebagai kebenaran, ia selalu membawa asumsi dan investasi ideologis yang tidak mudah tampak. Hal yang sama juga diungkapkan Jurgen Habermas, bahwa wacana pengetahuan tidak lepas dari kepentingan dan ideologi penguasa.³²

6. Mekanisme Kerja Analisis

Pada bagian terdahulu telah dijelaskan metode analisis penelitian yang digunakan, namun pada bagian ini akan dijelaskan kembali, agar terasa lebih fungsional dalam proses analisis datanya.

30 Eriyanto, *Analisis Wacana*, hal. 15.

31 Petrus Sunu Hardiyanta, *Michel Foucault*, hal. 30.

32 Yasir Alimi, *Jenis Kelamin Tuhan: Lintas Batas Tafsir Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2002), hal. 1046.

a. Mekanisme Kerja Arkeologi dan Genealogi Wacana

Untuk menganalisis apa saja gagasan-gagasan yang diperjuangkan JIL dan membedah “sesuatu yang tak terbaca” dalam pemikirannya, yaitu berkaitan dengan ideologi dan kepentingan teks (gagasan), peneliti menggunakan perangkat kerja analisis arkeologi dan genealogi wacana.

Arkeologi merupakan metode pencarian makna kebenaran teks dengan menganalisis sistem, prosedur produksi, strategi dan operasional wacana. Ia digunakan untuk meneliti sejarah munculnya pernyataan, fundamennya (perspektif), yang kemudian menjadi kebenaran dan ideologi. Ia bisa membaca teks yang tak terbaca pada teks dan membongkar dokumen-dokumen yang telah dimonumenkan oleh sejarah (kekuasaan, modal, media, agama), serta berusaha membuat tafsir baru atas dokumen itu.³³

Tugas genealogi adalah menganalisis hubungan timbal-balik antara sistem kebenaran, wacana dan sejarah dengan kuasa, rezim yang memproduksi dan menentukan kebenaran. Ia bertugas menganalisa awal mula wacana dan perkembangan kebenaran, serta menganalisis akar pengetahuan, dominasi, penyingkiran, penaklukkan, hubungan kekuatan dan kekuasaan.³⁴

Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Fokus Masalah	Metode	Dimensi Yang Dianalisis
Gagasan-gagasan JIL	Arkeologi	<ul style="list-style-type: none">• Menemukan ide (misalkan : kesetaraan gender)• Sejarah munculnya ide (bias gender)• Fundamen pembentuk ide (ilmu sosial-agama)• Argumen ilmiah ide (persamaan-kebebasan)• Siapa yang membentuknya (intelektual/liberalis)• Dimana kelas sosialnya (intelektual kaya/mapan)• Apa ideologinya (liberalisme)• Menemukan tafsir baru (elitis, borjuis, kapitalis)

33 Michel Foucault, *Arkeologi Pengetahuan*, (Yogyakarta: Qalam, 2002), hal. 225-244.

34 Petrus Sunu Hardiyanta, *Michel Foucault*, hal. 30; Nur Kholik Ridwan, *Pluralisme*, hal. 27-35.

Gagasan-gagasan JIL	Genealogi	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan wacana (pencerahan, reformasi, modern) • Peneguhan wacana (persamaan/kebebasan/hukum) • Marjinalisasi wacana (fikih islam klasik/wanita solehah) • Hubungan ide dengan relasi kuasa (pasar/bisnis/agama) • Untuk membela siapa (liberalisme/kapitalisme global) • Untuk kepentingan apa (pasar/bisnis/agama)
----------------------------	------------------	--

Tabel ini merupakan acuan dalam menganalisis teks-teks JIL. Karena teori arkeologi dan genealogi banyak ragam analisisnya, maka peneliti hanya membatasi beberapa dimensi saja, yang akan dijadikan sebagai perangkat analisis.

7. Elaborasi Teori Foucault dengan Pecheux, Althusser dan Gramsci

Dalam proses analisis arkeologis, nantinya akan dibantu oleh teori basis sosial dan kelas sosial, ideologi, kepentingan (Michel Pecheux), dan relasi kuasa (Michel Foucault), teori ideologi (Louis Althusser), dan teori hegemoni (Antonio Gramsci).

Pertama, Teori Basis Sosial dan Kelas Sosial. Tipologi borjuis (kaya) atau proletar (miskin) itu ditentukan oleh kelas sosial. Secara teoritis, posisi kelas menentukan sebuah gagasan dan ideologi. Dari sinilah muncul asumsi bahwa kelompok miskin mempunyai tipologi pemikiran dan kepentingan yang berbeda dengan kelompok borjuis. Perbedaan tipologi pemikiran itu menunjukkan pula perbedaan ideologi dan kepentingan yang dibelanya.³⁵

Atas dasar itu, pertanyaan yang perlu diajukan, dari manakah kelas sosial kelompok JIL berasal? Dari kelompok mapan, atau miskin? Kenapa gagasan-gagasan tertentu dikampanyekan, dan gagasan-gagasan yang lain tidak? Apa kepentingannya? Siapa dan apa yang dibela JIL? dan wacana apa yang disingkirkan oleh JIL?

Kedua, Teori Ideologi. Tipologi ideologi ditentukan oleh tiga level pembacaan. Pembacaan *pertama* pada level cara berpikir yang digunakan.

35 Nur Kholik Ridwan, *Pluralisme*, hal. 30.

Tipologi borjuis/kanan/mapan adalah cara berpikir untuk membela atau menguntungkan kaum mapan. Sedangkan tipologi pembebasan/kiri/proletar adalah cara berpikir untuk membela kelompok miskin, lemah dan tertindas. *Kedua*, pada level gagasan-gagasannya. Tipologi borjuis selalu mengusung gagasan-gagasan yang elitis dan tidak ada upaya untuk membebaskan kaum lemah, tertindas dan miskin secara drastis. Sedangkan tipologi pembebasan dalam gagasannya untuk membebaskan kaum lemah dan tertindas. *Ketiga*, pembacaan pada level metamorfosis gagasannya. Tipologi borjuis akan menghasilkan praksis-praksis politis-elitis, dan menguntungkan kelompok mapan. Sedangkan tipologi pembebasan dalam praksis sosialnya untuk pembelaan terhadap kaum lemah dan tertindas.³⁶

Dari tipologi di atas, pertanyaan yang perlu diajukan, apa tipologi ide (ideologi) JIL?, kanan atau kiri?, dan borjuis atau pembebasan?. Dengan terjawabnya pertanyaan itu maka akan tampak bahwa JIL itu sebenarnya berideologi apa.

Ketiga, Teori Kepentingan. Dalam teori Michel Pecheux, gagasan lahir dari individu atau komunitas yang mempunyai kepentingan dari gagasan, sementara individu atau komunitas lahir dari basis sosial yang mempengaruhinya, sehingga gagasan yang dilahirkan akan digunakan untuk membelanya.³⁷ Dari teori tersebut muncul pertanyaan, bagaimana kelas/basis sosial JIL?, siapa dan kepentingan apa yang diperjuangkan JIL?

Keempat, Relasi Kuasa. Menurut Foucault, kuasa tidak semata dimaknai sebagai kekuasaan formal seorang raja atau presiden, melainkan hubungan yang bersifat non formal (sosial).³⁸ Relasi kuasa yang bersifat politis adalah relasi gagasan dengan rezim kekuasaan dan perangkat-perangkatnya. Sedangkan relasi kuasa yang bersifat sosial itu misalkan relasi kuasa ekonomi, gender, ormas, agama, dan budaya. Relasi kuasa yang bersifat sosial juga termasuk kuasa internasional. Kaitannya dengan analisis ini, yang akan diungkap adalah kedua kuasa tersebut, kuasa politik dan sosial. Maka pertanyaannya, apakah relasi kuasa yang ada pada gagasan JIL itu bersifat politis atau bersifat sosial?

36 Nurkholik Ridwan, *Agama Borjuis*, (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2004), hal. 32-35.

37 Nur Kholik Ridwan, *Pluralisme*, hal. 37-40.

38 Michel Foucault, *Op.cit.*, hal. ix; Ilyas Supena, *Op.cit.*, hal. 33-35.

Kelima, Teori Hegemoni. Gramsci dengan teorinya membangun teori bagaimana penerimaan kelompok lain (yang didominasi) terhadap kelompok dominan berlangsung damai, tanpa kekerasan.³⁹ Teori ini meyakini pentingnya sebuah gagasan dan tidak pentingnya kekuatan fisik dalam kontrol sosial-politik. Dalam proses hegemoni, kelompok yang didominasi tidak merasa mereka didominasi dan tanpa disadari menginternalisasikan nilai ideologi, dan bahkan memberikan pembenaran. Proses hegemoni ini dibantu oleh agamawan, rohaniawan dan intelektual.⁴⁰ Dari teori ini, pertanyaannya apakah gagasan-gagasan JIL itu merupakan bentuk hegemoni?, dan apakah tokoh-tokoh JIL merupakan motor penggerak mesin hegemoni itu?

B. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Dari Penelusuran Arkeologi, Menemukan Gagasan Liberalisme Wacana JIL

a. Gagasan Liberalisme

Secara etimologi, gagasan liberalisme berarti bebas dari kefanatikan, bebas dalam menafsirkan agama dan terbuka terhadap ide-ide pembaharuan. Makna liberal dalam kalimat “Jaringan Islam Liberal” adalah kebebasan berpikir rasional dalam menafsirkan doktrin Islam yang membeku dan terbebaskan dari belenggu fanatisme dan otoritas keagamaan.⁴¹ Paham Liberal ini menjadi nama Islam Liberal. Untuk mewujudkan cita-cita Islam liberal, maka dibentuklah Jaringan Islam Liberal.⁴²

Liberalisme Islam yang dimaksudkan JIL dalam pengertian liberalisme ekonomi,⁴³ politik,⁴⁴ hukum dan sosial-budaya,⁴⁵ bukan

39 Eriyanto, *Op.cit.*, hal. 103.

40 Muhadi Sugiono, *Antonio Gramsci dan Perlawanan Dunia Ketiga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 31.

41 Sukidi, “Teologi Liberal untuk Islam Liberal”, *Kompas*, 06/08/2005, hal. 42.

42 Jaringan Islam Liberal, *Sebuah Profil Singkat*, hal. 06.

43 Luthfi Asyaukanie, “Kapitalisme Relegius”, di www.islamlib.com

44 Syariat Islam Dalam Pandangan Muslim Liberal, (Jakarta: JIL-Utan Kayu, 2003), Hal. 1-10.

45 Luthfi Asyaukanie, “Islam, Turisme dan Toleransi”, *Jawa Pos*/17/01/2005.

hanya liberalisme pemikiran.

Prinsip liberal dalam JIL adalah kebebasan berpendapat, berpolitik, beragama, toleransi, pluralisme, dan sekularisme. Prinsip-prinsip ini berlandaskan pada konsep humanisme dan rasionalisme yang berasal dari pencerahan Eropa.⁴⁶

b. Gagasan Pluralisme, Sekularisme, dan Demokrasi

Ulil Abshor Abdalla mendefinisikan pluralisme sebagai sumber kebenaran yang satu, yaitu Tuhannya semua agama. Kebenaran itu diberikan kepada siapa saja, kepada agama apa saja, hanya saja keyakinan dan ritual yang berbeda. Paham pluralisme ini juga disebut Ulil sebagai kebenaran Universal, kebenaran itu milik siapa saja, untuk semua agama. Paham ini pada kesempatan yang lain disebut Ulil sebagai paham substansialisme. Paham pluralisme, universalisme dan substansialisme memandang bahwa tidak perlunya formalitas dalam beragama, atau memformalkan agama dalam kehidupan bernegara. Esensi kebenaran semua agama adalah sama. Agama yang satu tidak membatalkan agama lain, hanya karena agama tertentu lebih kemudian. Nabi yang satu juga tidak membatalkan adanya nabi yang lain.⁴⁷

Sekularisme adalah paham yang memisahkan otoritas agama dari pelaksanaan roda pemerintahan. Menurut Hamid Basyaib, sekularisme merupakan ide tentang imparialitas negara terhadap semua ajaran agama.⁴⁸ Menurut JIL gagasan sekularisme adalah upaya memisahkan otoritas duniawi dan ukhrowi, otoritas keagamaan dan kekuasaan politik. JIL berkeyakinan bahwa kekuasaan agama dan politik harus dipisahkan. Bagi JIL, sekularisme dan demokrasi tidak bisa ditawarkan lagi, karena mengingat potensi-potensi otoritas keagamaan yang sangat represif dan mengingat kehidupan bangsa yang sangat jamak.⁴⁹

JIL menentang negara teokrasi (negara agama). JIL menolak penerapan Syariat Islam. Alasan JIL karena masyarakat Indonesia sangat majemuk, dan di sisi lain, tidak adanya kejelasan tentang syariat Islam

46 Ahmad Sahal, "Anti Liberalisme dari Kanan", *Kompas*, 06/08/2005, hal. 41.

47 Ulil Abshor Abdalla, "Islam, Toleransi dan Rekonsiliasi," *Jawa Pos*/02/01/2005.

48 Hamid Basyaib, "Ke Turki Kita Mengaji", dalam Luthfi Asyaukanie (peny.), *Wajah Liberal Islam Di Indonesia*, (Jakarta: JIL-Utan Kayu, 2002), hal. 74.

49 Jaringan Islam Liberal, *Op.cit.*, hal. 10.

yang mana, yang akan diterapkan, karena pemahaman umat beragam. Bahkan bagi JIL konsep “Negara Islam” itu tidak ada. Teokrasi Islam di masa silam itu hanya merupakan kerajaan Islam saja, bukan negara Islam. Nabi pun tidak pernah mengajarkan tentang wajibnya mendirikan negara Islam, justru Islam atau nabi mengajarkan prinsip-prinsip demokrasi.⁵⁰

c. Modernisasi dan Ijtihad

Semakin pesat perubahan zaman semakin kompleks pula persoalan keagamaan yang hadir. Misalnya, persoalan bayi tabung, bunga bank, asuransi, MLM, presiden wanita, nikah via telpon, internet, dan seterusnya. Mungkinkah Islam hanya diam saja? Di sinilah, JIL menganggap pentingnya ijtihad dan modernisasi.⁵¹

JIL percaya bahwa ijtihad atas teks akan menciptakan Islam yang dinamis dan bisa bertahan di segala musim. Penutupan pintu ijtihad akan membuat Islam mati membusuk. Ijtihad harus dilakukan dalam semua aspek kehidupan.⁵²

Namun demikian, JIL menganggap modernisasi lebih identik dengan pembaharuan yang bersifat duniawi. Modernisasi bisa disamakan dengan rasionalisasi, artinya proses perombakan pola pikir dan tata kerja lama (tradisional) menggantikan pola pikir dan alat kerja yang lebih modern. Modernisasi bukanlah rasionalisme Barat, apalagi westernisasi, melainkan perombakan yang tidak ada implikasi ideologi.⁵³

JIL berpandangan bahwa pintu ijtihad selalu terbuka untuk siapa saja. Pembukaan kembali pintu ijtihad adalah hal amat penting demi sebuah kemajuan dan dinamisasi agama Islam sendiri.⁵⁴

Modernisasi yang diungkapkan Ulil, bahwa pembaharuan atau inovasi dalam masalah keduniaan adalah sesuatu yang dianjurkan dalam agama. Masyarakat anti modernisasi akan stagnan dan hancur.⁵⁵ JIL

50 Saiful Mujani, *Syariat Islam dalam Pandangan Muslim Liberal*, (Jakarta : JIL, 2003), hal. 20-51.

51 Yusuf Al-Qordhawi, *Ijtihad Kontemporer*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hal. 05-21.

52 Jaringan Islam Liberal, *Op.cit.*, hal. 08.

53 Ulil Abshor Abdalla, “Islam, Toleransi dan Rekonsiliasi,” *Jawa Pos*/02/01/2005.

54 Jaringan Islam Liberal, *Op.cit.*, hal. 08.

55 Ulil Abshor Abdalla, “Islam, Toleransi dan Rekonsiliasi,” *Jawa Pos*/02/01/2005.

berkeyakinan bahwa ijtihad atas teks-teks keagamaan adalah jalan keluar dari kebekuan dan keterbelakangan dan bisa memungkinkan Islam menjadi terus eksis sampai kapan pun.⁵⁶

Dalam ijtihad, JIL berlandaskan kepada semangat keagamaan (*maqosid syar'iyah*) dan etika-moral al-Qur'an dan al-hadits. Bukan berlandaskan pada teks. Pemahaman secara tekstual hanya akan membusukkan islam, tapi jika berdasarkan relegio-etik, Islam akan terus hidup dan berkembang searah perkembangan zaman.⁵⁷

Ulil tidak segan-segan mengadopsi peradaban Barat dan tentunya mengambil hal-hal yang positif. Bagi Ulil kebenaran ada dimana-mana, di Timur Tengah, Barat dan Yunani, China, dan lain sebagainya.⁵⁸

d. Inklusivisme, Toleransi dan Dialog Antar-Agama

Sejarah dialog antar-agama ini disebabkan oleh konflik agama yang berkepanjangan. Hal ini disebabkan agama memiliki standar ganda, agama bisa berwajah damai di satu ketika, dan bisa menjadi bengis di waktu yang lain.⁵⁹

Di samping itu, agama mempunyai sifat *truth claim* (klaim kebenaran) dan *salvation claim* (klaim penyelamatan). Banyak kasus kerusuhan yang berwajah agama, ada juga konflik yang pada dasarnya tidak berawal dari agama, seringkali agama dijadikan kambing hitam untuk menyulut emosi konflik. Hal ini menunjukkan bahwa agama mudah sekali dilibatkan dalam arena konflik.⁶⁰

Sampai saat ini masih saja terjadi konflik yang berbau SARA, terutama atas nama agama. Atas dasar itu, Ulil menawarkan konsep inklusifisme, toleransi dan dialog antar-agama serta rekonsiliasi.⁶¹

Inklusivisme adalah sikap keterbukaan terhadap realitas

56 Jaringan Islam Liberal, *Sebuah Profil Singkat*, hal. 08.

57 <http://www.islamlib.com>.

58 Ulil Abshor Abdalla, "Islam, Toleransi dan Rekonsiliasi," *Jawa Pos*/02/01/2005.

59 Boy Pradana, *Agama Empiris dalam Realitas Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. Vi.

60 Syamsul Arifin, *Merambah Jalan Baru Dalam Beragama*, (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2000), hal. 67.

61 Ulil Abshor-Abdalla, "Islam, Toleransi, dan Rekonsiliasi," *Jawa Pos*, 26/12/2004 & 2/1/ 2005.

keberagaman umat. Toleransi merupakan sikap menerima keberbedaan. Kedua sikap itulah yang akan menumbuhkan dan mengembangkan dialog antar-agama. Bahkan JIL meyakini bahwa beragama atau tidak beragama adalah urusan personal yang harus dilindungi. JIL tidak membenarkan penganiayaan atas dasar agama tertentu dan fatwa tertentu.⁶²

Untuk menumbuh-kembangkan sikap keterbukaan dan toleransi itu, tentunya masing-masing umat beragama harus bisa memahami apa sebenarnya makna agama itu, dan untuk apa manusia beragama, kenapa harus berbeda, bagaimana menyikapinya. Apakah beragama untuk saling membunuh?, menyalahkan yang lain?, benarkah beragama untuk berkonflik?. Disinilah paham pluralisme dibutuhkan, agar tercipta sikap saling terbuka (inklusif) dan bisa menerima (toleran). Jika hal tersebut terjadi maka tidak sulit untuk melakukan dialog umat beragama.⁶³

e. Nikah Beda Agama

JIL memperbolehkan nikah antar-agama. Gagasan ini dilatarbelakangi oleh gagasan pluralisme agama, universalisme islam, konsep ahlul kitab. Ulil memperbolehkan nikah beda agama berdasarkan al-Maidah ayat 5 dan berdasarkan pengertian Islam adalah agama ketundukan, bukan formal agama.⁶⁴

Gagasan kebolehan nikah beda agama, Ulil berdasarkan pendapat Abdullah Yusuf Ali, yang memperbolehkan perkawinan dengan ahlul kitab.⁶⁵ Kemudian makna ahlul kitab seperti yang dipahami Cak Nur dan Zainun Kamal.⁶⁶ Kebolehan itu, menurut Zainun Kamal, tidak hanya bagi muslim saja boleh menikahi wanita ahlul kitab, tapi laki-laki ahlul kitab pun boleh menikahi muslimah.⁶⁷

62 Jaringan Islam Liberal, *Sebuah Profil Singkat*, hal.10.

63 Ulil Abshor Abdalla, "Islam, Toleransi dan rekonsiliasi," *Jawa Pos*/02/01/2005.

64 Ulil Abshor-Abdalla, "Islam, Toleransi, dan Rekonsiliasi", *Jawa Pos*/02/01/2005.

65 Ulil Abshor-Abdalla, "*Islam, Turisme dan Toleransi*", *Jawa Pos*, 2/1/2005.

66 Zainun Kamal, "Penganut Budha dan Hindu adalah Ahlul Kitab" dalam Luthfi Assyaknie, *Op.cit.*, hal. 143-147.

67 Abu Umar Abillah, *Islam Liberal: Bangkitnya Islam Protestan*, (Klaten: Pustaka Sahabat, t.th), hal. 105-110; lihat wawancara Zainun Kamal dengan Nong Darol Mahmada, di *Jawa Pos*, 30 Juni 2002 dan 07 Juli 2002, tentang "Nikah Beda Agama: antara Teks dan Realitas".

Hal ini ternyata tidak hanya sekadar gagasan, akan tetapi dipraktekkan oleh Zainun Kamal, ketika ia menikahkan Karlina Octarany yang muslimah dengan Dedy Corbuzier yang Katolik. Kautsar Azhari Noer pernah menikahkan laki-laki muslim dengan wanita Konghucu, sedangkan yang menjadi saksi adalah Ulil Abshor Abdalla.⁶⁸ Nurcholish Madjid pernah menikahkan anaknya dengan laki-laki Yahudi.⁶⁹

f. Kritik Atas Jilbab (Jilbab Tidak Wajib)

Ulil secara tegas tidak mewajibkan jilbab, karena merupakan kebudayaan lokal Arab saat itu, termasuk hukum potong tangan, rajam, dan qishos.⁷⁰

Menurut Nong Darol Mahmada, sebenarnya jilbab bukan milik Islam, melainkan milik yahudi dan nasrani, bahkan jilbab itu ada tahun 3000 SM. Dalam agama Yahudi dan Nasrani, penggunaan hijab lebih karena persoalan dosa, sedangkan dalam Islam penggunaan jilbab lebih karena persoalan etika daripada substansi.⁷¹

Dengan mengutip Al-Asmawi, Mahmada mengatakan jilbab bukan kewajiban. Rambut, suara dan tubuh wanita bukan aurat.⁷² Alasan-alasan yang digunakan JIL sangat realistis dan empiris. Misalkan wanita yang bekerja di perusahaan asing yang anti-jilbab. Haruskah para wanita itu terbuang dari pekerjaannya hanya karena jilbab? Agama bukanlah penghambat kehidupan dan agama tidak mau mengorbankan umatnya. Oleh karena itu, jilbab bukanlah kewajiban.⁷³

Menurut Novriantoni, penyeragaman jilbab bagi wanita merupakan tindakan fasisme berlabel agama. Novri memberikan contoh

68 Hartono Ahmad Jaiz, *Ada Pemurtadan di IAIN*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hal.189-199.

69 Hartono Ahmad Jaiz, *Kursi Panas Pencalonan Nurcholish Madjid Sebagai Presiden*, (Jakarta: Darul Falah, 2003), hal. 75.

70 Ulil Abshor-Abdalla, "Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam", *loc.cit.*

71 Nong Darol Mahmada, "Kritik Atas Jilbab" dalam Abdul Muqstith Ghazali, *Ijtihad Islam Liberal, Upaya Merumuskan Keberagaman Yang Dinamis*, (Jakarta: JIL, 2005), hal. 130.

72 Nong Darol Mahmada, *Op.cit.*, hal.130-133.

73 Saiful Amien, "Menyorot Aurat dan Jilbab", dalam Abdul Muqstith Ghazali, *Op.cit.*, hal. 136-138.

kasus Padang, yang mana Walikotanya mewajibkan jilbab bagi wanita agama mana pun. Hal ini jelas suatu pemaksaan dalam beragama dan merusak kebinekaan Indonesia.⁷⁴

g. Emansipasi Wanita (Menggugat Ketimpangan Gender)

Menurut JIL, Islam dihadirkan sebagai agama pembebasan, terutama untuk membebaskan perempuan. Pada saat itu, masyarakat Arab dikenal sering membunuh anak perempuannya. Dengan datangnya Islam, masyarakat Islam Arab diperintahkan melakukan akikah atas kelahiran anak perempuan. Perempuan pada awalnya tidak mendapatkan warisan, setelah Islam hadir, perempuan mendapatkan warisan. Setidaknya ada penghormatan terhadap perempuan saat itu.⁷⁵

Menurut JIL, Islam dalam ajarannya yang paling esensi, menyamakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan diantaranya. Takwalah yang membedakan. Kesempatan manusia adalah sama, yang membedakan adalah kemampuan masing-masing. Oleh karena itu, JIL memperbolehkan perempuan menjadi imam sholat laki-laki,⁷⁶ perempuan boleh jadi presiden,⁷⁷ perempuan boleh tampil (berhias) di depan publik, beraktivitas dan berkarir.⁷⁸

h. Dari Penelusuran Geneologi, Menemukan Kepentingan Gagasan-Gagasan JIL

Pada bagian ini akan menjawab pertanyaan : *Pertama*, apakah basis sosial dan kelas sosial JIL bersifat borjuis atau proletar? *Kedua*, Apa kepentingan gagasan-gagasan JIL?.

Secara teoritis, basis sosial dan kelas sosial menentukan gagasan,

74 Novriantoni, "Kasus Jilbab Padang dan Fasisme Kaum Moralis", dalam Abdul Muqsih Ghazali, *Op.cit.*, hal.139-141.

75 Nasaruddin Umar, "Teologi Pembebasan Perempuan", dalam Luthfi Assyaukanie, *Op.cit.*, hal. 44.

76 Husen Muhammad, "Perempuan Boleh Mengimami Laki-Laki" dalam Abdul Muqsih, *Op.cit.*, hal. 279-284.

77 Faqihuddin Abdul Kodir, "Tafsir Humanis", dalam Abdul Muqsih Ghazali, *Op.cit.*, hal.117-119.

78 Nong Darol Mahmada, "Hijabisasi Perempuan...", dalam Luthfi Assyaukanie, *Op.cit.*, hal. 47-50.

kepentingan dan ideologi. Kelompok miskin mempunyai tipologi pemikiran dan kepentingan yang diperjuangkan, dan berbeda dengan kelompok borjuis. Perbedaan tipologi pemikiran itu menunjukkan pula perbedaan ideologi dan kepentingan yang dibelanya dari gagasannya itu.⁷⁹

Dalam teori, gagasan lahir dari individu atau komunitas yang mempunyai kepentingan, sementara individu atau komunitas lahir dari basis sosial yang mempengaruhinya, sehingga gagasan yang dilahirkan akan digunakan untuk membelanya.⁸⁰

Setiap gagasan yang tampak mempunyai kepentingan yang tak tampak. Apa yang tampak (gagasan) merupakan hasil dari kepentingan yang memunculkan gagasan. Sesuatu yang tak tampak (kepentingan) itu dipandang sebagai fakta yang menghasilkan gagasan.

Analisis Pertama, Basis Sosial dan kelas sosial JIL. Jaringan JIL adalah jaringan non-profit, yang mendapatkan bantuan dari *The Asia Foundation* dan *The Ford Foundation*.⁸¹ Kampanye JIL ini melalui media cetak, internet, siaran radio, dan siaran TV. Jaringan ini telah menyebar ke mana-mana, di seluruh kota-kota besar di Indonesia, melalui jaringan aktivis, universitas, LSM, ormas dan lembaga-lembaga lain yang berkepentingan.

Walaupun JIL merupakan organisasi jaringan nirlaba, posisi kelasnya JIL sangat mapan, dan kaya. Hal ini bisa dilihat dari bantuan dana yang masuk untuk aktivitas JIL. Aktivitas JIL membutuhkan dana yang besar. Misalkan penerbitan buku, penyiaran radio, tayangan televisi, internet, seminar, diskusi, lokakarya, penerbitan bulletin, dll. Dari mana JIL bisa beraktivitas, jika tidak ada dana yang besar.

Dengan kata lain JIL bisa dimasukkan ke dalam basis sosial yang mapan dan kaya (borjuis). Oleh karena itu JIL selalu mensosialisasikan gagasan-gagasan orang kaya dan mapan (demokrasi, sekularisme, pluralisme, gender, kapitalisme), bukan gagasan yang bisa membebaskan kaum tertindas dari monopoli ekonomi pasar, dan politik (ekonomi

79 Nurkholik Ridwan, *Pluralisme... Op.cit.*, hal. 30.

80 Nurkholik Ridwan, *Pluralisme...Op.cit.*, hal. 37-40.

81 JIL mendapat bantuan dana dari *The Ford Fondation* dan *The Asia Fondation*, lihat makalah KH. Abdul Hamid Baidowi, *Bahaya Islam Liberal*, Dewan Murid Bidang Kultum Madrasah Ghazaliyyah Syafi'iyah Sarang Rembang, Jateng, Jum'at, 22 Agustus 2003.

kerakyatan, demokrasi pancasila, dll). JIL sedang membela kelompok-kelompok mapan, dan kaya (borjuis). Sebagaimana dalam teori kelas sosial, bahwa latar belakang seseorang menentukan gagasan yang diperjuangkan. Orang kaya pasti memperjuangkan ide-ide orang kaya.

Selanjutnya, analisis basis sosial dan posisi kelas personal JIL. Dari sisi identitas basis sosialnya, sulit menemukan identitas spesifik, apakah JIL merupakan komunitas NU, Muhammadiyah, HMI atau PMII. Karena personal-personal JIL beragama, di samping itu, visi-misi dan tujuannya tidak sama dengan Ormas lain, sehingga JIL memang independen.

Posisi kelas personal-personal JIL tergolong dari keluarga kaya (paling tidak kelas menengah ke atas), karena melihat dari latar belakang pendidikan mereka, dan keluarganya. Seperti Ulil, dan Luthfi berasal dari keluarga yang punya pondok pesantren, pendidikan sampai ke perguruan tinggi, bahkan bisa kuliah di luar negeri.

Latar belakang mereka, semuanya pernah mengenyam pendidikan perguruan tinggi; di masa kuliahnya mereka aktif di berbagai organisasi; mereka mempunyai cara berpikir yang sama yakni liberal; punya sikap yang sama yakni sikap demokratis, pluralis, toleran, inklusif dan humanis. Latar belakang mereka memang beragam, tapi mereka bisa seragam dalam satu wadah. Latar belakang mereka adalah dosen, peneliti, penulis, aktif di berbagai Ormas, LSM, bahkan sekarang ada yang aktif di partai politik.

Dari gambaran di atas, yang ingin dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mampu dan mapan secara ekonomi, sehingga mereka lebih leluasa bergerak dan beraktivitas. Mereka punya akses lebih besar ke media dan kekuasaan. Mereka bukanlah bagian dari kelompok marjinal, proletar, miskin-papa dan tak mempunyai, melainkan kelompok mapan, dan kaya (borjuis), kelompok yang selalu diuntungkan dari sisi politik dan ekonomi.

Dalam teori Pecheux, basis sosial dan posisi kelas sangat mempengaruhi cara berpikir seseorang, ketika ia menghasilkan suatu gagasan dan gagasan itu tentunya tidak lepas dari kepentingan dan ideologi yang membuat gagasan itu sendiri. Gagasan merupakan materialisasi ideologi tertentu, melalui cara berpikir seseorang, yang menghasilkan suatu gagasan, atau dengan kata lain, gagasan adalah bentuk dari ideologi yang diwacanakan.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa pertama yang menjadi

landasan bahwa basis sosial JIL adalah komunitas intelektual muslim liberal, bukan representasi komunitas NU, Masyumi, PMII atau HMI. Kedua, posisi kelas mereka adalah orang mampu, kaya dan mapan, bukan orang miskin dan papa-kedana.

Dari dua alasan itu, maka gagasan-gagasan yang mereka usung adalah gagasan-gagasan liberalisme, di mana gagasan-gagasan ini menguntungkan kelompok mereka sendiri yaitu kelompok liberal, mapan dan kaya (borjuis).

Analisis Kedua, apa kepentingan gagasan JIL; siapa dan apa yang sedang dibela; kenapa gagasan-gagasan tertentu dikampanyekan dan gagasan-gagasan lain tidak?.

Dari sisi basis sosialnya, gagasan-gagasan JIL itu secara tidak langsung untuk membela kepentingan kelompok kanan, liberal, kapital (pemodal) dan kaya (borjuis). Apa kepentingan kelompok liberal, kapital dan kaya (borjuis) itu? Adalah terwujudnya masyarakat yang maju, modern, liberal, bebas berpendapat, berekspresi, beragama, dan berpolitik, toleran, terbuka; terciptanya tatanan politik yang demokratis; tidak adanya fanatisme terhadap agama dan aliran; bisa menerima pihak lain; terpisahnya agama dari kehidupan politik; gaya hidup modern (materialis-hedonis-pragmatis); kesetaraan gender, wanita karir, dan menerima konsekuensi dari persaingan pasar bebas; serta perkembangan ekonomi cepat pesat.

Kenapa gagasan tertentu (gagasan khilafah islamiyah, menolak pasar bebas, atau menolak buruh kontrak) tidak diusungnya? Karena gagasan tersebut bukan termasuk visi misi JIL dan tidak menguntungkan mereka. Gagasan tolak pasar bebas adalah gagasan Islam Kiri, sedangkan gagasan khilafah islamiyah adalah gagasan Islam Fundamentalists (Ikhwanul muslimin, dan hizbut tahrir).

Mana buktinya JIL membela kepentingan orang kaya, liberal, kanan, borjuis, kapitalis global/pemodal internasional? Lihat saja gagasan-gagasan JIL tentang kesetaraan gender, de-hijabisasi, wanita karir, kapitalisme relegius, ekonomi pasar bebas, demokrasi liberal, sekularisme, dll. Semuanya mempunyai kepentingan yang menguntungkan pihak kanan, liberal, kapitalis, dan borjuis. *Analisis Pertama*, gagasan “kapitalisme relegius” agar ideologi kapitalisme global diterima oleh umat Islam Indonesia, sehingga dengan mudah gagasan-gagasan lain pun bisa masuk dan bisa diterima umat islam.

Analisis Kedua, gagasan gender, feminisme, wanita karir, dan dehisialisasi agar para wanita muslimah tidak menggunakan cadar dan jilbab sehingga mereka tampil di publik dengan penampilan yang modis, seronok dan segala pernak-pernik kosmetik yang digunakan. Maksud dari gagasan ini adalah bisnis kosmetik dan model. Wanita adalah sasaran empuk produk-produk kapitalisme global, karna nafsu belanja dan berhias para wanita sangat tinggi. Disamping itu, aurat atau tubuh wanita merupakan alat untuk iklan yang paling laris, dan mencuri perhatian nafsu birahi laki-laki. Coba bandingkan antara bintang iklan wanita yang menutup aurat dengan wanita buka aurat (nampak paha, bibir, dan wilayah dadanya).

Jika wanita sudah berani membuka jilbabnya dan tampil di depan publik mustahil rasanya tanpa berhias, tanpa ikuti model, trend dan modis. Di samping itu, jika wanita sibuk di luar rumah, meninggalkan tugas mendidik anak di rumah, maka yang akan terjadi adalah keluarga *broken home*, dan anak nakal akan terlahir dari keluarga itu. Jika generasi islam sudah menjadi anak nakal maka mereka akan menjadi “hamba sahaya” produk kapitalisme global. Narkoba, ekstasi, miras, video porno, musik, dan gaya hidup liberal menjadi ciri khas mereka. Hedonisme, pragmatisme dan konsumerisme menjadi pola pikir dan pola laku mereka. Identitas islam mereka hilang tak berbekas. Mereka bahkan tidak mengenal islam. Apalagi disuruh berdakwah, sebarkan kebaikan islam, jauh dari harapan.

Analisis Ketiga, gagasan pluralisme agama JIL akan berdampak kepada lemahnya iman generasi islam, menganggap ajaran ritual-formal islam tidak penting, tidak mau mengamalkan ajaran agamanya, meremehkan sunnah nabinya, meragukan keaslian alquran, mengkritik hadis tanpa ilmu yang benar, hanya berkiblat kepada orientalisme, dan bahkan banyak generasi atau pengikut islam liberal tidak sholat lima waktu dan berbicara agama tanpa dalil yang benar.

Contohnya ada kelompok mahasiswa islam liberal di salah satu kampus islam negeri di semarang yang menghalalkan nikah sesama jenis. Ada mahasiswa akidah filsafat menduduki al-Quran karena katanya itu hanya kertas, bukan kalamullah. Ada juga mahasiswa yang mempelesetkan singakat IAIN dengan “ingkar Allah inkar nabi”. Ada juga tulisan di spanduk untuk mahasiswa baru di kampus islam di bandung dengan slogan “selamat datang di area kampus bebas tuhan”. Bahkan ada

mahasiswa yang memplesetkan singkatan PMII menjadi “pergerakan mahasiswa insya Alloh islam”. Islamnya sendiri mereka ragukan.

Itu semua adalah hasil dari paradigma liberalisme dalam berpikir dan berijtihad. Siapa yang dirugikan? Islam yang sesuai al-Quran dan Hadits-lah yang dirugikan (Islam Aswaja), karena umatnya tidak mengamalkan islam secara paripurna. Dengan begitu gampanglah budaya-budaya barat (kapitalisme global) masuk dan menjadi tuntunan umat islam.

Siapakah yang diuntungkan dari kondisi umat seperti di atas? Jelas sekali yang diuntungkan adalah kapitalisme global. Dengan kondisi demikian sangat mudah mereka untuk menawarkan produk-produk, baik produk yang mubah/halal (KFC, cocacola, mcdonald, dll) maupun yang haram (narkoba, pornografi, pornoaksi, musik, model busana toples, dll). Karena umat islam tidak mengenal agamanya sendiri, tidak tahu hukum, tidak mau belajar agamanya, dan lebih suka terhadap pemikiran liberal.

Analisis keempat, gagasan toleransi. Dari gagasan ini, umat islam disuruh toleran dengan menjamurnya tempat-tempat maksiat, yang ada di kawasan turis di bali dan lombok. Dan disuruh juga toleransi terhadap penyimpangan agama islam, seperti JIL membela Ahmadiyah dan aliran-aliran sesat lainnya.

Analisis kelima, gagasan-gagasan JIL akan menuntut terjadinya liberalisasi di bidang ekonomi dan budaya. Misalkan Assyaukanie dalam tulisannya menghalalkan maksiat demi suksesnya kawasan industri turisme, dan perlu adanya toleransi demi masuknya investor asing, dan perlunya regulasi maksiat, dsb.⁸² Assyaukanie juga menulis tentang “Kapitalisme Relegius” dan komentar-komentar bernada pembelaan anggota JIL terhadap isu-isu seputar Inul Daratista, RUU pornoaksi dan pornografi.⁸³ Hal ini menunjukkan JIL itu mengusung isu liberalisme ekonomi dan budaya.

82 Luthfi Assyaukanie, “Islam, Toleransi dan Turisme”, *Jawa Pos*, 17/09/2005.

83 Lihat website JIL : www.islamlib.com.

3. Dari Penelusuran Arkeologi, Menemukan Ideologi Gagasan JIL

Adapun ideologi yang ada pada gagasan-gagasan JIL adalah ideologi liberalisme (demokrasi dan sekularisme) dan ideologi kapitalisme global (neo-liberalisme). Pertanyaan selanjutnya, apakah ideologi liberalisme JIL itu bersifat kanan atau kiri, kebebasan atau pembebasan (kritis-transformatif), borjuis (kaya) atau proletar (miskin)?.

Dalam Manifesto JIL, disebutkan cara berpikir JIL dalam melihat teks dan realitas, yaitu: (1). mengutamakan semangat relegio-etik, bukan makna literal teks; dan (2). menggunakan paradigma liberal-rasional; (3). cara berpikir yang bercorak pluralisme, relativisme dan substansialisme.⁸⁴ Cara berpikir seperti itu lebih dekat dengan cara berpikir filosofis, substansialis dan humanis. Bukan cara pikir kritis-transformatif. Adapun Paradigma liberal lebih dekat dengan paradigma positivisme⁸⁵ dan bermakna “kanan”.

Assyaukanie mengakui bahwa makna liberal di Barat adalah kanan, bukan kiri. Artinya kelompok liberal itu kelompok yang pro terhadap penguasa, baik itu pemerintah, pemodal, maupun media. Sedangkan makna kiri adalah mereka yang menentang penguasa karena dalih penindasan, dan ingin bebas dari penindasan dan menginginkan keadilan.⁸⁶

Jika memang JIL adalah kiri, kenapa tidak memakai istilah Islam Kiri saja dan menggunakan paradigma kritisisme-transformatif.

Dari analisis di atas jelas bahwa ideologi JIL bercorak tipologi “kanan”. Dengan sendirinya “ideologi kanan” menjadi landasan berpikir JIL dalam melihat teks. Ideologi kanan dan cara berpikir yang telah dipengaruhi itulah akan melahirkan gagasan yang kanan pula.⁸⁷

84 Jaringan Islam Liberal, *Op.cit.*, hal. 08-10.

85 Eriyanto, *Op.cit.*, hal.4-20.

86 Assyaukanie, *Op.cit.*, hal. 158.

87 Penggunaan istilah “Jaringan” pada JIL pun sangat problematik. Kalau memang JIL menginginkan perubahan sosial terjadi, kenapa harus memilih istilah jaringan, yang terkesan non-formal dan instan, kenapa tidak memilih istilah “pergerakan”, yang lebih visioner, revolusioner dan berkelanjutan. Atau istilah “lembaga” yang lebih terkesan formal (jelas visi, misi, AD/ART-nya) dan untuk orientasi ke depan, bukan sebuah “forum” yang terkesan instan, dan lantaran ada “proyek intelektual”, serta cepat bubar

Analisis gagasan JIL ini bisa menentukan tipologi ideologi JIL yang sebenarnya. Tipologi ideologi JIL itu bisa dilihat dari cara berpikir, gagasan yang diusungnya sendiri, serta simbiosis gagasan-gagasannya. Namun di sini terfokus pada gagasan-gagasan JIL saja. Gagasan-gagasan itu di antaranya : liberalisme, sekularisme, demokrasi, pluralisme, toleransi, feminisme, de-hijabisasi, nikah beda agama. Gagasan-gagasan itu jelas merupakan produk-produk liberalisme-kapitalisme (yang kanan itu), sehingga ideologi JIL bisa digolongkan ke dalam tipologi ideologi liberalisme atau ideologi Kapitalisme.⁸⁸

Penyebutan JIL sebagai penganut liberalisme Barat adalah tidak berlebihan, karena hal itu bisa dilihat dari cara berpikir dan gagasan yang diusungnya. Gagasan-gagasan itu jelas merupakan produk-produk liberalisme Barat (yang kanan).

Kemudian gagasan-gagasan itu akan diuji dari sisi pembebasannya. Setelah mengkaji teks-teks JIL secara arkeologis, ternyata hasil kerja analisis itu menghasilkan kesimpulan bahwa gagasan-gagasan JIL itu terdiri dari gagasan tentang liberalisme, sekularisme, demokrasi, pluralisme, toleransi, inklusivisme, substansialisme, universalisme, modernisme, nikah beda agama, dialog antar-agama, emansipasi, dan de-jilbabisasi.

Kemudian, pertanyaan pertama yang perlu diajukan adalah, di mana gagasan tentang pembebasan itu, padahal secara eksplisit bahwa JIL memaknai “liberal” sebagai kebebasan dan pembebasan. Pembebasan dari struktur politik yang menindas.⁸⁹

Sedangkan landasan berpijak JIL diantaranya adalah memihak pada minoritas yang tertindas.⁹⁰ Menurut JIL, Islam liberal itu berpihak pada minoritas yang tertindas, dan terpinggirkan. Setiap struktur politik yang mengawetkan praktek-praktek ketidakadilan adalah bertentangan dengan Islam. Minoritas harus dipahami secara luas, mencakup minoritas agama, etnik, ras, jender, budaya, politik dan ekonomi.

Setelah melacak gagasan-gagasan JIL itu dalam teks yang dijadikan

jika tidak ada dana.

88 Mansur Fakhri, *Analisis Gender*, cet. VIII, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 40-58

89 Jaringan Islam Liberal, *Op.cit.*, hal. 06.

90 Jaringan Islam Liberal, *Op.cit.*, hal. 09.

sebagai unit analisis dalam penelitian, tidak ditemukan satu pun gagasan-gagasan yang membebaskan kaum minoritas, kecuali membela “minoritas aliran agama yang sesat”, sementara minoritas yang lain (etnik, korban ekonomi, politik) luput dari perhatian JIL. Demikian juga dalam buku-buku terbitan JIL⁹¹ dan di internet (www.islamlib.com), peneliti tidak menemukan hal yang sama. Hasilnya nihil. Kecuali membela kaum minoritas “aliran sesat” menurut MUI.

Tidak ada gagasan JIL yang membebaskan kaum miskin kota, anak jalanan, petani, buruh, TKI, PRT, korban kekerasan politik (PKI, kasus Mei '98), dan kerusakan lingkungan. Gagasan-gagasan yang lebih disukai JIL justru gagasan tentang demokrasi, sekularisme, liberalisme, pluralisme, dialog agama, nikah beda agama, emansipasi, dejilbabisasi, yang mana gagasan-gagasan itu tidak dibutuhkan oleh kaum pedesaan, marjinal, miskin kota, korban imigrasi, korban politik demokrasi liberal dan korban ekonomi pasar (kapitalisme).

Karena gagasan-gagasan pembebasan tidak ada dalam gagasan JIL, maka yang mau dikatakan bahwa tipologi ideologi JIL adalah borjuis, dan kanan. Dengan kata lain, JIL mengusung gagasan-gagasan yang elitis dan tidak ada upaya untuk membebaskan kaum lemah, dan tertindas. Dalam logika kebalikannya, ketika dalam gagasan-gagasan JIL itu tidak ada gagasan yang berpotensi membebaskan kaum tertindas, maka yang sedang JIL bela kelompok kebalikannya, yaitu kelompok mapan secara politik, ekonomi dan pemodal.

4. Dari Penelusuran Geneologi, Menemukan Relasi Kuasa dan Hegemoni Gagasan JIL

Pertanyaan yang akan dijawab dalam bagian ini, apakah relasi kuasa yang ada pada gagasan-gagasan JIL itu bersifat politis atau sosial? Ideologiskah atau represifkah?, apa yang dilakukan JIL dengan gagasan-gagasannya itu terhadap tindakan kuasa (kuasa politik dan sosial)?, Apakah gagasan-gagasan JIL itu merupakan bentuk hegemoni?, dan apakah tokoh-tokoh JIL merupakan motor penggerak mesin hegemoni itu?

91 Luthfi Assyaukanie, (2002), *Wajah Liberal Islam Di Indonesia*, Abdul Muqit Ghazali, (2005), *Ijtihad Islam Liberal*, buku *Syariat Islam, Pandangan Muslim Liberal*, (2003). Buku Milad Hanna, *Menyongsong yang Lain, Membela Pluralisme*, (2005), dan Sa'id Al-Asymawi, *Kritik Atas Jilbab*, (2003).

Asumsi awal bahwa gagasan-gagasan JIL itu ada kaitannya dengan istilah penjajahan model baru (neo-kolonialisme) di Indonesia. Asumsi ini jika diperjelas akan mengatakan begini, bahwa gagasan-gagasan JIL ada kaitannya dengan ideologi kapitalisme global, ideologi yang menjajah bumi Indonesia saat ini, sebagai penjajah model baru, setelah Indonesia merdeka tahun 1945.

Negara ketiga yang baru merdeka (termasuk Indonesia), sangat lemah secara ekonomi dan butuh bantuan dari luar negeri. Kondisi seperti inilah yang dimanfaatkan oleh konsep pembangunanisme, yang merupakan “anak kandung” dari kapitalisme global.

Setelah negara ketiga merdeka, maka dibuatlah penjajahan model baru, dari penjajahan secara fisik ke non-fisik, agar mereka tidak kehilangan pengaruh di bekas negara jajahannya. Untuk menyasiasi hal itu, negara-negara kapitalis mengadakan pertemuan pada bulan Juli 1944, yang akan merumuskan strategi baru dalam menghadapi negara-negara yang baru merdeka dan akan merdeka. Hasil pertemuan itu negara-negara kapitalis sepakat pertama, membentuk lembaga bank dunia (*world bank*), IBRD (*internasional bank for reconstruction and development*), IMF (*international monetary found*). Lembaga ini berfungsi sebagai pemberi pinjaman kepada negara-negara yang baru merdeka. Kedua, membentuk GATT (*general agreement of tariffs and trade*). Lembaga ini berfungsi mengatur dan mengembangkan perdagangan dunia agar sesuai dengan kepentingan kapitalis. Ketiga, mendirikan PBB, lembaga yang mengatur hubungan politik antar-negara.⁹²

Diskursus pembangunan (developmentalisme) kemudian muncul sebagai tawaran dari keterbelakangan negara baru merdeka. Term-term tentang penanaman modal asing, pinjaman luar negeri, modernisasi, pendidikan, hukum, pemberdayaan SDA, stabilitas nasional, menjadi suatu yang menjanjikan bagi perubahan lebih maju dan modern bagi dunia ketiga.⁹³

Gagasan-gagasan kapitalisme global masuk ke dunia ketiga pasca kemerdekaan, melalui proyek pembangunan dan kerjasama antar-

92 Hasyim Wahid, dkk., *Telikungan Kapitalisme Global dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 1999), hal. 15-16.

93 Saiful Arief, *Menolak Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal. 221-225.

negara Eropa. Gagasan-gagasannya itu masuk melalui berbagai jalur aspek kehidupan, yaitu liberalisasi ekonomi, liberalisasi pemikiran, liberalisme politik, dan liberalisasi sosial-budaya. Liberalisme ekonomi dikemas dengan konsep-konsep yang sangat ilmiah, seperti gagasan pasar bebas, hutang luar negeri, investasi asing dll. Gagasan liberalisme politik dikemas dalam konsep demokrasi, dan sekularisme.⁹⁴ Liberalisme pemikiran keagamaan dikemas dengan islam liberal (islam rasional, modernis, neo modernis, dan JIL).

Orde baru sangat antusias dalam mengadopsi dan menerapkan konsep-konsep yang ditawarkan oleh kapitalisme. Apa yang terjadi selama Orde Baru, yang menerapkan konsep pembangunan itu? Kemiskinan, kerusakan lingkungan, penumpukan hutang luar negeri, pengangguran, eksploitasi alam, kesenjangan sosial-ekonomi, kerusuhan sosial-politik, swastanisasi, privatisasi, dan yang lebih parah lagi adalah Indonesia sebagai negara yang sudah merdeka, tapi saat ini hidupnya bergantung pada IMF, bank dunia, dan modal asing. Semua kebijakan internal negara bisa dipastikan adanya intervensi luar negeri.⁹⁵

Kaitannya antara gagasan JIL dengan sejarah panjang penjajahan di Indonesia itu apa? Menurut Umaruddin Masdar, untuk memuluskan dan mensukseskan ideologi kapitalisme itu, banyak cara yang dilakukan, termasuk dengan cara hegemoni wacana keagamaan. Hegemoni dan manipulasi wacana keagamaan dalam hal ini adalah gagasan-gagasan Islam Liberal, gagasan-gagasan yang loyal dan pro pembangunan dan kapitalisme global.⁹⁶

Jika dianalisis secara genealogis, gagasan “Islam Rasional”-nya Harun Nasution, “Islam Liberal”-nya JIL, dan Neo-modernisme Islam-nya Cak Nur, sengaja dihadirkan (oleh rezim pengetahuan internasional) bersamaan dengan dijalankannya ideologi pembangunan (*developmentalisme*). Sama halnya dengan gagasan *civil society*. Ia muncul bersamaan dengan hadirnya wacana demokrasi dan de-legitimasi Orde Baru, yang mulai tidak patuh dan sudah tidak dibutuhkan lagi oleh kuasa kapitalisme global. Islam liberal dihadirkan bersamaan dengan

94 Hasyim Wahid, dkk., *Op.cit.*, hal. 26-27.

95 Eko Prasetyo, *Islam Kiri: Melawan Kapitalisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 85-161.

96 Umaruddin Masdar, *Agama Kolonial*, (Yogyakarta: KLIK-R, 2003), hal. 2-8.

kebijakan liberalisasi politik, ekonomi dan budaya, baik yang dijalankan oleh kapitalisme sendiri, maupun “boneka” kapitalisme global.⁹⁷

Kenapa wacana Islam Liberal, Neo-Modernis, atau Islam Rasional perlu dihadirkan kaitannya dengan pembangunan di Indonesia? Hal ini karena mengingat mayoritas rakyat Indonesia adalah beragama Islam. Islam merupakan ancaman bagi siapa pun yang menjajah. Semangat jihad Islam selalu dikobarkan untuk melawan penjajahan. Oleh karena itu doktrin dan semangat gerakan Islam perlu dilumpuhkan dari dalam Islam sendiri, agar ruh jihadnya berkurang, dan bahkan bisa melegitimasi gerakan pembangunan dan modernisasi di Indonesia. Untuk kepentingan itu, agen pengetahuan internasional (kapitalisme global) mengeluarkan dana cukup besar untuk program beasiswa kuliah luar negeri, beasiswa penelitian, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan proyek-proyek pengetahuan lainnya.⁹⁸

Banyak mahasiswa Indonesia dikuliahkan secara gratis di Barat, yang mengambil konsentrasi *islamic studies* atau *economic studies*, dan *political studies*.⁹⁹ Tiga dimensi pengetahuan inilah yang diserang oleh ideologi pengetahuan internasional (kapitalisme global) dalam rangka hegemoni dan manipulasi kesadaran orang-orang Indonesia. Dengan didikan Barat seperti itu, maka akan menghasilkan pemikir, intelektual, agamawan yang liberal, ekonom liberal, dan ilmuwan politik liberal atau politisi praktis liberal. Dengan cara-cara seperti itulah wacana Islam Liberal menjadi kokoh di Indonesia. Banyak sekali tokoh intelektual-agamawan-rohaniawan yang membela JIL ketika JIL dikritik.

Pada bagian analisis ini bagaimana proses peneguhannya, serta proses penyingkiran gagasan yang lain. Ketika sejarah ide-ide JIL, fundamen pembentuknya, metode, argumen ilmiah dan perspektif yang digunakan adalah sejarah reformasi protestan dan pencerahan Eropa,

97 Umaruddin Masdar, *Op.cit.*, hal. 04.

98 Harun Nasution, Nurcholish Madjid, Ulil Abshor-Abdalla, dkk., mendapatkan beasiswa dan pasokan dana dari luar negeri, yaitu *The Ford Foundation*, dan *The Asia Foundation*.

99 Jika dipikir kenapa belajar agama Islam (*Islamic Studies*) di Amerika, Kanada, Australia, Jerman, Inggris, Australia, dan dosennya para orientalis. Seharusnya belajar Islam di Madinah, Makkah, Mesir, dan Yaman. Dan mencari dosen yang akidahnya jelas. Ada apa di negara Barat itu? Pencucian otak atau pola pikir jawabannya. Targetnya menjadi agen pengetahuan liberalisme.

maka gagasan tentang Nasionalisme Bangsa, Islam Tradisional dan Islam Radikal akan tersingkir, karena kedua model Islam ini dianggap sebagai penghambat perubahan, pembangunan dan modernisasi. Penyingkiran itu tidak hanya melalui pertarungan wacana antara Islam Liberal versus Islam Tradisional atau Radikal, melainkan melalui represi pemilik modal dan pemerintah yang mendukungnya. Untuk membuktikan hal ini bisa dilihat dari kenyataan struktur politik pada masa orde baru, di mana kelompok tradisonal (NU) dan radikal (PKI, PNI) termarjinalkan bahkan difitnah, dan dibubarkan, sedangkan kelompok islam modernisme, intelektual liberal (didikan Amerika yang tergabung dalam Mafia Berkeley), mendapat perlakuan baik (selalu diuntungkan) dari sisi wacana dan politik. Pada abad pencerahan Eropa terjadi hal yang sama, yaitu kelompok-kelompok agama tidak mendapat tempat dalam pemerintahan. Agama tidak punya otoritas sama sekali.¹⁰⁰

Dari diskripsi di atas, dapat ditegaskan bahwa ada relasi kuasa antara gagasan Islam Liberal (Islam Rasional, Islam Modernis, Islam neo-modernis, Jaringan Islam Liberal) dengan pemerintah Indonesia sejak Orde Baru, sampai saat ini. Ketika awal Orba berkuasa tahun 60-an, ketika itu pula secara bersamaan hadir Islam Rasional-nya Harun Nasution, kemudian diteruskan oleh Cak Nur dan Ulil Abshor Abdalla, dkk. Mereka semua hasil didikan Barat.

Demikian juga gagasan-gagasan Islam Liberal ada kaitannya dengan relasi kuasa pengetahuan internasional (kapitalisme global). Seperti gagasan liberalisme pemikiran keagamaan, Demokrasi, Sekularisme, Pluralisme, Toleransi, Inklusivisme, dialog agama, Modernisasi, gender, pasar bebas, dan de-jilbabisasi. Itu semua merupakan gagasan-gagasan yang diusung kapitalisme global.

Menurut Revrison Baswir,¹⁰¹ pada masa pemerintahan Bambang Susilo Yudoyono pun masih kental sekali paham Neo-liberalisme (neolib), nama lain dari kapitalisme global. Bisa dilihat dari struktur Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), adalah mereka yang berideologi Neo-liberalisme. Mereka lebih mengedepankan ekonomi pasar. Mereka

100 Lihat Hasyim Wahid, *Op.cit.*, hal. 26-27.

101 Revrison Baswir "Konspirasi Mazhab Ekonomi", dalam *Gatra/no.23/Tahun XI/25/April/2005*, hlm. 134-135. Revrison Baswir sosok penggagas ekonomi kerakyatan, yang anti-ekonomi pasar bebas.

pernah bekerja di lembaga-lembaga Neo-liberalisme seperti IMF, *World Bank*, dan *Asia Development Bank*.

Menurut Alexander Irwan, direktur lembaga riset IDEA Yogyakarta,¹⁰² Cengkraman ideologi neolib semakin kuat, karena, di samping masuk melalui agama (Islam liberal, dkk.), neolib masuk lewat perguruan tinggi-perguruan tinggi, lembaga-lembaga riset kampus, beasiswa luar negeri, lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM),¹⁰³ sehingga hampir 90 % pola pikir ekonom, dan mahasiswa Indonesia semuanya liberal, menganut paham liberalisme (pro) pasar, lantaran guru dan diktat kuliahnya berkiblat pada mazhab liberalisme ekonomi.

Neolib muncul sejak tergulingnya Sukarno,¹⁰⁴ yang kemudian digantikan oleh Suharto. Suharto yang didukung Amerika, menerapkan konsep “pembangunanisme”, yang di dalamnya termasuk liberalisme ekonomi, investasi asing, hutang luar negeri, deregulasi, dan privatisasi. Pada era Suharto, tim ekonomi pemerintah ditangani oleh orang-orang yang berhaluan Neolib, yang lebih dikenal dengan “Mafia Berkeley”.¹⁰⁵ Hal ini tidak jauh dengan apa yang terjadi pada kabinet Indonesia bersatu (KIB).¹⁰⁶

Semangat liberalisasi terus berlanjut, ketika MPR membentuk badan pekerja untuk mengubah pasal 33 UUD 1945 tentang “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”, yang beranggotakan tujuh orang : Sjahrir, Sri Adiningsih, Didik Rahbini, Sri Mulyani Indrawati, Bambang Sudibyo, Dawam Raharjo, dan Mubyarto. Terjadi perdebatan sengit antara meliberalkan pasal itu dan mempertahankannya seperti semula. Mubyarto, penggagas ekonomi pancasila itu mengundurkan diri setelah selama 72 hari berdebat, kemudian diikuti oleh Dawam, yang terkenal dengan penggagas ekonomi Islam itu. Mubyarto dan

102 Alexander Irwan, *Gatra*/no.23/Tahun XI/25/April/2005, hal.135.

103 Mansour Fakhri, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 101-155.

104 Sukarno adalah sosok yang sangat anti-liberalisme, anti-hutang luar negeri, dan ekonomi pasar. Sehingga ia tampak sosok yang lebih cenderung ke arah sosialisme. Kemudian di era Suharto diganti dengan kapitalisme. Lihat *Gatra*, *Op.cit.*, hal. 138.

105 Alexander Irwan, *Op.cit.*, hal.135.

106 Revisond Baswir, *Op.cit.*, hal. 134-135.

Dawam mempertahankan pasal 33 UUD 1945 itu, sementara Sjahrir, Sri Adiningsih, Sri Mulyani Indrawati pasal itu harus diganti dengan semangat liberalisme-kapitalisme. Sementara Didik dan Bambang di posisi mengambang, namun keduanya menyadari bahwa kapitalisme, setelah runtuhnya komunisme sejak tahun 1991, ada di semua negara.¹⁰⁷

Hal itu bukan rahasia lagi, tapi telah menjadi rahasia publik, bahkan Rizal Malaranggeng menyebutkan dalam disertasinya, bahwa kelompok-kelompok yang membela *episteme* liberalisasi dan berperan dalam liberalisme ekonomi itu adalah Gunawan Muhammad (*Tempo*).¹⁰⁸ Fikri Jufri (*Tempo*) dan Jacob Oetama (*Kompas*), Nono Anwar Makarim (*kolomnis*), Hadi Susastro (ekonom dan pemimpin lembaga riset pemerintah), Sudrajat Jiwandono (pejabat pemerintah), dan termasuk *geng Mafia Berkeley*.¹⁰⁹

Dari penerapan konsep *developmentalisme*, *free market*, *non-intervensionisme*, dkk., akibatnya sektor-sektor strategis yang penting bagi kelangsungan negara dan hajat rakyat dikuasai oleh asing dan swasta kaya. Inilah konsekuensi dari konsep pasar bebas dan “pembangunanisme”. Pada tahun 2003, ada 10 PDAM yang telah diprivatisasi (pengelolaan dan kebijakan apa pun dimiliki oleh pihak asing).¹¹⁰

Di bidang telekomunikasi, Indosat telah dijual ke asing, yaitu Singapura. Negara kecil diujung Pulau Batam telah memegang rahasia bangsa yang besar ini. Aneh bin ajaib.

Persoalan negeri ini begitu banyak. Ada beberapa pihak yang harus bertanggungjawab atas persoalan itu. *Pertama*, pemerintah yang menerapkan ideologi liberalisme, baik dalam bentuk liberalisme ekonomi (pasar bebas), maupun liberalisme politik. *Kedua*, kelompok yang mengusung, mendukung dan bahkan membela ideologi liberalisme tersebut. Kelompok kedua ini mencakup ekonom, intelektual muslim, pemikir liberal, aktivis LSM, politisi, budayawan, peneliti, agamawan dan universitas.

107 Gatra/23/April/2005, hal. 137.

108 Gunawan Muhammad adalah salah satu tokoh pendiri Komunitas Utan Kayu Jakarta Timur, dan Jaringan Islam Liberal-nya Ulil Abshor-Abdalla, dkk.

109 “Perang Pasal Belum Selesai”, dalam *Gatra/23/April/2005*, hal. 137.

110 P. Raja Siregar, dkk., *Politik Air : Penguasaan Asing Melalui Utang*, (Jakarta: WALHI-KAU, 2004), hal. 108-109.

Pertanyaan selanjutnya, kaitannya dengan teori Althusser, ideologiskah atau represifikah gagasan-gagasan JIL itu?. Jika teori Althusser itu dikontekskan dengan gagasan-gagasan JIL yang telah dijelaskan di atas, maka bisa dibahasakan bahwa gagasan-gagasan JIL itu merupakan gagasan-gagasan (yang sangat) ideologis dari sebuah negara. Apalagi sampai menggunakan media massa, sebagaimana dikatakan oleh Althusser, media sebagai perangkat ideologis dari suatu negara. Walaupun yang dilakukan JIL itu hanya sekadar mengkampanyekan gagasan-gagasan yang ideologis (mempengaruhi dan memanipulasi publik), tapi sesungguhnya ia sedang mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan tertentu, baik kekuasaan formal di tingkat nasional (Demokrasi), maupun kuasa sosial internasional (Kapitalisme Global).

Pertanyaan selanjutnya yang perlu diajukan, kaitannya dengan teori hegemoni Gramsci, apakah gagasan-gagasan JIL itu merupakan bentuk hegemoni?, dan apakah (tokoh-tokoh) JIL merupakan motor penggerak mesin hegemoni kekuasaan?

Teori hegemoni Gramsci jika dibenturkan dengan gagasan-gagasan JIL itu maka, sebagaimana telah dijelaskan di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa *pertama*, gagasan-gagasan JIL itu merupakan bentuk hegemoni penguasa, baik penguasa di tingkat nasional maupun kuasa internasional. *Kedua*, JIL merupakan motor penggerak mesin hegemoni kekuasaan tersebut, yang mana motornya adalah media massa, yang disetir oleh para intelektual, akademisi, politisi (atau teoritisasi politik), agamawan dan budayawan. *Kompas*, *Jawa Pos*, *Tempo*, dan media lain yang ikut mensosialisasikan ide-ide JIL merupakan mesin hegemoni penguasa yang dilancarkan oleh JIL.

C. KESIMPULAN

1. Gagasan-Gagasan JIL

Dari penelusuran arkeologis, dapat disimpulkan bahwa gagasan-gagasan JIL itu adalah gagasan tentang Liberalisme, Sekularisme, Demokrasi, Pluralisme, Universalisme, Substansialisme, Relativisme, Inklusivisme, Toleransi, Dialog Antar-Agama, Modernisasi, Ijtihad, Nikah Beda Agama, Kritik Jilbab (de-hijabisasi), dan gender (Emansipasi).

Dari sisi perspektif, teori yang digunakan JIL dalam kerja-kerja

intelektualnya menggunakan pendekatan/paradigma positivisme, rasionalisme, empirisme, humanisme dan liberalisme, sehingga menghasilkan gagasan-gagasan islam yang liberal dan sangat berbeda dari hasil ijtihad para ulama, baik ulama salaf, maupun kholaf.

2. Kepentingan Gagasan JIL

Dari sisi basis sosialnya, gagasan-gagasan JIL itu secara tidak langsung membela kepentingan kelompok kanan, liberal, kapital (pemodal) dan kaya (borjuis). Apa kepentingan kelompok liberal, kapital dan kaya (borjuis) itu? Adalah terwujudnya masyarakat yang maju, modern, liberal, bebas berpendapat, berekpresi, beragama, dan berpolitik, toleran, terbuka; terciptanya tatanan politik yang demokratis; tidak adanya fanatisme terhadap agama dan aliran; bisa menerima pihak lain; terpisahnya agama dari kehidupan politik; gaya hidup modern (materialis-hedonis-pragmatis); kesetaraan gender, wanita karir, dan menerima konsekuensi dari persaingan pasar bebas; serta perkembangan ekonomi secara cepat.

3. Ideologi Gagasan JIL

Ideologi gagasan JIL adalah liberalisme dan kapitalisme. Adapun tipologi ideologi gagasan JIL bersifat liberal (kebebasan), kanan, borjuis dan elitis, karna JIL tidak membela kelompok tertindas secara sosial-ekonomi, bahkan dengan wacananya menguntungkan kelompok kanan, penguasa, kaya, pemodal dan borjuis. JIL hanya mengedepan kebebasan berpikir, dan tidak melakukan pembebasan kaum tertindas secara sosial-politik, justru melanggengkan ketimpangan itu. JIL bukanlah islam kiri yang kritis terhadap penindasan kaum proletar. Gagasan JIL tidak bisa membela dan membebaskan kaum tertindas, miskin kota, anak jalanan, dan buruh-imigran.

4. Relasi Kuasa dan Hegemoni Gagasan JIL

Dari sisi relasi kuasa dengan gagasan, JIL merupakan kepanjangan tangan dari kepentingan rezim kapitalisme global (baik secara langsung maupun tidak), yang mana rezim ini mencita-citakan masyarakat yang modern, bebas dan perdagangan bebas lintas negara.

Gagasan-gagasan Islam Liberal ada kaitannya dengan relasi

kuasa pengetahuan internasional (kapitalisme global). Seperti gagasan liberalisme pemikiran, liberalisme Demokrasi, Sekularisme, Pluralisme, Relativisme, Universalisme, dan Substansialisme, Inklusivisme, dialog agama, Modernisasi, gender, dan de-jilbabisasi. Itu semua merupakan gagasan-gagasan yang diusung oleh JIL dan kapitalisme global. Di sisi yang lain, JIL juga kelompok yang pro-pemerintah. Islam liberal (islam rasional, islam modernis, neo modernis, dan JIL) sengaja dihadirkan dalam rangka memuluskan ideologi kapitalisme dan pembangunanisme di Indonesia, dalam rangka hegemoni dan manipulasi wacana keagamaan agar mudah diterima oleh ummat islam. Islam liberal dihadirkan bersamaan dengan kebijakan liberalisasi politik, ekonomi dan sosial-budaya, baik yang dijalankan oleh kapitalisme sendiri, maupun oleh bonekanya, yaitu pemerintahan Orba dan penerusnya. Gagasan-gagasan JIL itu merupakan bentuk hegemoni kuasa (penguasa), baik penguasa di tingkat nasional (presiden) maupun internasional (Kapitalisme global). Dan JIL merupakan motor penggerak hegemoni penguasa tersebut, yang mana motornya adalah media massa, yang disetir oleh para intelektual, akademisi, agamawan, rohaniawan, dan budayawan.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla, Ulil Abshor. "Islam, Toleransi dan Rekonsiliasi," *Jawa Pos*, 02/01/2005.
- Abdalla, Ulil Abshor. "Islam, Toleransi, dan Rekonsiliasi," *Jawa Pos*, 26/12/2004.
- Abdalla, Ulil Abshor. "Islam, Turisme dan Toleransi," *Jawa Pos*, 2/1/2005.
- Abdalla, Ulil Abshor. "Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam," *Kompas*/18/11/2002.
- Abdalla, Ulil Abshor. *Pertarungan Wacana Islam Liberal*. Yogyakarta: Elsaq, 2003.
- Abillah, Abu Umar. *Islam Liberal: Bangkitnya Islam Protestan*. Klaten : Pustaka Sahabat, t.t.
- al-Asymawi, Muhammad Sa'id. *Kritik Atas Jilbab*, (terj. Novriantoni dan Oppei), Jakarta: JIL-Utan Kayu, 2003.
- Ali, Muhib Aman. *ASWAJA*, PP Besuk Kejayan Pasuruan, Jatim, 2006.
- Alimi, Yasir. *Jenis Kelamin Tuhan: Lintas Batas Tafsir Gender*. Yogyakarta : LKIS, 2002.
- Al-Qordhawi, Yusuf. *Ijtihad Kontemporer*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Aminudin. *Analisis Wacana*. Yogyakarta: Kanal. 2002.
- Arief, Saiful. *Menolak Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Arifin, Syamsul. *Merambah Jalan Baru Dalam Beragama*, Yogyakarta: Ittaqa Press, 2000.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Assyaukanie, Luthfi. (peny.), *Wajah Liberal Islam Di Indonesia*, JIL, Utan Kayu, 2002.
- Assyaukanie, Luthfi. *Islam dalam Konteks Pemikiran Pascamodernisme*, Jurnal Ulumul Qur'an, No. 01, Vol. V, Jakarta: 1994.
- Assyaukanie, Luthfi. "Islam, Turisme dan Toleransi," *Jawa Pos*/17/01/2005.
- Assyaukanie, Luthfi. "Kapitalisme Relegius", di www.islamlib.com.
- Baidowi, KH. Abdul Hamid. *Bahaya Islam Liberal*, Dewan Murid Bidang Kultum Madrasah Ghazaliyyah Syafi'iyah Sarang Rembang, Jateng, Jum'at, 22 Agustus 2003.
- Baso, Ahmad. *Arkeologi Pemikiran Civil Society Islam Indonesia*. Pustaka Hidayah, 1999.
- Baswir, Revrison. "Konspirasi Mazhab Ekonomi", dalam *Gatra*/no.23/ Tahun XI/25/April/2005.

- Basyaib, Hamid. "Ke Turki Kita Mengaji", dalam Luthfi Assyaukanie (peny.), *Wajah Liberal Islam Di Indonesia*, Jakarta: JIL-Utan Kayu, 2002.
- Berton, Greg. *Gagasan Islam Liberal di Indonesia, Pemikiran Neomodernisme Nurcholish Madjid*, Jakarta : Paramadina- IKAPI-The Ford Foundation, 1999.
- Burhanudin (ed.), *Syariat Islam, Pandangan Muslim Liberal*, Jakarta: JIL-Utan Kayu, 2003.
- Eriyanto, *Analisis Wacana*. Yogyakarta : LKIS, 2003.
- Eriyanto. *Analisis Framing:Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS, 2004
- Fakih, Mansur. *Analisis Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Fakih, Mansur. *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Foucault, Michel. *Arkeologi Pengetahuan*, Yogyakarta: Qalam, 2002.
- Ghazali, Abdul Muqsit. (peny.), *Ijtihad Islam Liberal, Upaya Merumuskan Keberagaman Yang Dinamis*. Jakarta: JIL, 2005.
- Hanna, Milad. *Menyongsong Yang Lain, Membela Pluralisme*, (terj. M. Guntur Romli), Jakarta: JIL-Utan Kayu, 2005.
- Hardiyanta, Petrus Sunu. *Michel Foucault dan Disiplin Tubuh*. Yogyakarta: LKIS. 1997.
- Hidayat, Dedy N. *Paradigma Penelitian Komunikasi*. Bandung : Jurnal ISKI. 1999.
- Husaini, Adian. *Islam Liberal*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Irwan, Alexander. Dalam *Gatra*/no.23/Tahun XI/25/April/2005.
- Jaiz, Hartono Ahmad. *Ada Pemurtadan di IAIN*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Jaiz, Hartono Ahmad. *Kursi Panas Pencalonan Nurcholish Madjid Sebagai Presiden*, Jakarta: Darul Falah, 2003.
- Jaringan Islam Liberal, *Syariat Islam, Pandangan Muslim Liberal*, 2003.
- Kamal, Zainun. "Penganut Budha dan Hindu adalah Ahlul Kitab" dalam Luthfi Assyaukanie (peny.), *Wajah Liberal Islam Di Indonesia*, Jakarta: JIL-Utan Kayu, 2002.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. "Tafsir Humanis Atas Kepemimpinan", dalam Abdul Muqsih Ghazali, (peny.), *Ijtihad Islam Liberal*, Jakarta: JIL, Utan Kayu, 2005.
- Mahmada, Nong Darol. "Hijabisasi Perempuan Dalam Ruang Publik",

- dalam Luthfi Assyaukanie (peny.), *Wajah Liberal Islam Di Indonesia*, Jakarta: JIL-Utan Kayu, 2002.
- Mahmada, Nong Darol. “Kritik Atas Jilbab” dalam Abdul Muqsith Ghazali, (peny.), *Ijtihad Islam Liberal*, JIL, Utan Kayu, 2005.
- Mahmada, Nong Darol. di *Jawa Pos*, 30 Juni 2002 dan 07 Juli 2002.
- Masdar, Umaruddin. *Agama Kolonial*. Yogyakarta: KLIK-R, 2003.
- Muhammad, Husen dan Nur Rofi’ah, “Perempuan Boleh Mengimami Laki-Laki”, dalam Abdul Muqsith, (peny.), *Ijtihad Islam Liberal*, Jakarta: JIL-Utan Kayu, 2005.
- Mujani, Saiful. *Syariat Islam dalam Pandangan Muslim Liberal*, Jakarta : JIL, 2003.
- Novriantoni, “Kasus Jilbab Padang dan Fasisme Kaum Moralis”, dalam Abdul Muqsith Ghazali, (peny.), *Ijtihad Islam Liberal*, Jakarta: JIL-Utan Kayu, 2005.
- Pradana, Boy. *Agama Empiris dalam Realitas Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Prasetyo, Eko. *Islam Kiri: Melawan Kapitalisme*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002.
- Qodir, Zuly. *Islam Liberal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Ridwan, Nur Kholik. *Agama Borjuis*, Yogyakarta: Ar-Ruz, 2004.
- Ridwan, Nur Kholik. *Pluralisme Borjuis*, Yogyakarta: Gerigi Pustaka, 2002.
- Sahal, Ahmad. “Anti Liberalisme dari Kanan”, *Kompas*, 06/08/2005.
- Siregar, Raja. *Politik Air : Penguasaan Asing Melalui Utang*, Jakarta: WALHI-KAU, 2004.
- Sobur, Alex. *Analisis Teks Media*. Bandung: Rosda Karya, 2002.
- Solihin, Saiful Amien. “Menyorot Aurat dan Jilbab”, dalam Abdul Muqsith Ghazali, (peny.), *Ijtihad Islam Liberal*, Jakarta: JIL-Utan Kayu, 2005.
- Sudibyoy, Agus. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta : LKIS, 2001.
- Sugiono, Muhadi. *Antonio Gramsci dan Perlawanan Dunia Ketiga*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1999.
- Sukidi, “Teologi Liberal untuk Islam Liberal”, *Kompas*, 06/08/2005.
- Supena, Ilyas dan Ahmad Fauzi. *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*. Yogyakarta: Gama Media dan Walisongo Press. 2003.
- Suprayogo, Imam. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung:

- Rosdakarya. 2001.
Syariat Islam Dalam Pandangan Muslim Liberal, JIL-Utan Kayu, Jakarta, 2003.
- Thompson, John B. *Analisis Ideologi*, Yogyakarta: Ircisod. 2003.
- Umar, Nasaruddin. “Teologi Pembebasan Perempuan”, dalam Luthfi Assyaukanie (peny.), *Wajah Liberal Islam Di Indonesia*, Jakarta: JIL-Utan Kayu, 2002.
- Wahid, Hasyim. *Telikungan Kapitalisme Global dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, Yogyakarta: LKIS, 1999.
- www.islamlib.com/profil.